



Meningkatkan Kemampuan Apparatur BKAD Dalam Mengelola Aset Regional Dengan Menggunakan Sistem Informasi

Improving the Bkad Apparatus's Capability in Managing Regional Assets by Using Information Systems

Citra Dewi Zalsani^{1*}, Rahmawati Umar²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Indonesia

E-mail: citrazalsani18@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 05-01-2026

Revised : 07-01-2026

Accepted : 09-01-2026

Published : 11-01-2026

Abstract

This study aims to analyze strategies for increasing the capacity of Regional Finance and Asset Agency (BKAD) officials to manage regional assets effectively and efficiently through the implementation and utilization of regional asset management. The results indicate that increasing the capacity of BKAD officials is crucial, particularly in terms of technical competence in using the information systems (SIMDA BMD/SIPD) and understanding regional asset management regulations. Key obstacles identified include data fragmentation, a lack of human resources (HR), and a suboptimal understanding of the system. Effective capacity building strategies include ongoing training, synergy between sectors, and leadership strengthening.

Keywords: *Capacity Building, BKAD Apparatus, Regional Asset Management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan kapasitas aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam mengelola aset daerah secara efektif dan efisien melalui implementasi dan pemanfaatan sistem informasi manajemen aset daerah (seperti SIMDA BMD atau SIPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur BKAD sangat krusial, terutama dalam aspek kompetensi teknis penggunaan sistem informasi (SIMDA BMD/SIPD) dan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah. Hambatan utama yang ditemukan meliputi fragmentasi data, kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), dan belum optimalnya pemahaman terhadap sistem. Strategi peningkatan kapasitas yang efektif mencakup pelatihan berkelanjutan, sinergi antar bidang, dan penguatan kepemimpinan.

Kata Kunci: *Peningkatan Kapasitas, Aparatur BKAD, Pengelolaan Aset Daerah*

PENDAHULUAN

Keberhasilan tata kelola wilayah dan peningkatan PAD (Public Asset Development) untuk wilayah tersebut didukung kuat oleh pengelolaan aset daerah yang optimal. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, ditetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota harus mengelola aset secara terorganisir, transparan, dan bertanggung jawab. Wewenang ini dikelola secara terpusat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Saat ini, implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi *mandatory* untuk

Sistem ini menyediakan inventaris aset, pelaporan, dan keamanan. Namun demikian, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan profesionalisme petugas BKAD yang mengoperasikannya (Sumber 1.2, 1.4, 1.6). Kurangnya sumber daya manusia dan pemahaman sistem juga ditemukan oleh beberapa penelitian (Sumber 1.3, 2.5). Oleh karena itu,



penting untuk mengembangkan strategi peningkatan kapasitas dalam konteks digitalisasi untuk pengelolaan aset regional. Pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung kemandirian fiskal daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memegang peranan krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penatausahaan, inventarisasi, pemanfaatan, hingga pelaporan seluruh aset milik daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya mengamanatkan agar pengelolaan aset dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Inovasi dan adaptasi dalam tata kelola, khususnya manajemen aset, sangat diperlukan di era digital. Pemerintah daerah kini diwajibkan untuk memasang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Aset Daerah (BMD) atau, yang lebih baru, mengintegrasikannya ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Implementasi sistem informasi ini berupaya mengatasi sejumlah masalah manajemen aset tradisional, termasuk data yang salah, pelaporan yang terlambat, dan kemungkinan pencurian aset. Integrasi data yang cepat, rekonsiliasi yang sederhana, dan peningkatan akuntabilitas laporan keuangan daerah semuanya dimungkinkan oleh sistem informasi ini (Fauzi, 2020; Nursafitri & Andayani, 2022). Namun, adopsi teknologi yang canggih ini tidak akan optimal tanpa didukung oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Transformasi dari sistem manual ke sistem berbasis komputer menuntut peningkatan kapasitas aparatur BKAD secara fundamental. Aparatur tidak hanya dituntut memahami regulasi pengelolaan aset yang kompleks, tetapi juga harus memiliki kompetensi teknis dalam mengoperasikan, memelihara data, dan menganalisis output dari sistem informasi tersebut (Fransiska *et al.*, 2025). Berbagai studi awal menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi sistem informasi aset adalah kesenjangan kompetensi aparatur, resistensi terhadap perubahan, serta kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis studi kasus (Muhibuddin & Juharni, 2024; Di Harjo & Desfina, 2024).

Oleh karena itu, studi ini relevan dan penting untuk mengevaluasi dan mengembangkan rencana peningkatan kapasitas yang sukses bagi staf BKAD, terutama dalam hal penggunaan sistem informasi aset regional. Untuk mencapai pengelolaan aset regional yang terbaik, bertanggung jawab, dan berbasis data, penelitian ini berfokus pada identifikasi kebutuhan kompetensi, penilaian efektivitas program pelatihan saat ini, dan pembuatan model peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan memahami secara menyeluruh (holistik) prosedur, kesulitan, dan taktik untuk meningkatkan kemampuan pejabat BKAD dalam menerapkan sistem informasi manajemen aset regional. Kondisi di lapangan dijelaskan secara metodis, jujur, dan akurat menggunakan pendekatan deskriptif (Creswell, 2014). Pendekatan studi yang digunakan adalah Studi Kasus (*Case Study*) (Yin, 2018). Pendekatan ini relevan untuk meneliti secara intensif satu unit organisasi tunggal, yaitu satu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dengan fokus pada fenomena peningkatan kapasitas yang berintegrasi dengan sistem informasi (SIMDA BMD/SIPD).



Meningkatkan kompetensi pegawai Badan Pengelola Aset Daerah (BKAD) dalam mengelola aset daerah merupakan pendekatan strategis yang sangat menekankan pengembangan keterampilan manajerial dan teknis serta kemampuan teknologi informasi. BKAD bertujuan untuk membangun tata kelola aset yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan efektif dengan menerapkan sistem informasi aset daerah. Tahapan-tahapan berikut termasuk dalam proses peningkatan kapasitas yang sistematis dan bertahap ini.

1. Pemetaan Kompetensi Aparatur

Menentukan kemampuan staf yang terlibat dalam pengelolaan aset adalah langkah pertama. Pemetaan kompetensi dilakukan oleh BKAD untuk memastikan pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan barang milik daerah (BMD),

- a. Kemampuan teknis dalam inventarisasi, pelaporan, dan pencatatan aset
- b. Literasi teknologi dalam menggunakan sistem informasi aset.
- c. Hasil pemetaan ini digunakan untuk menciptakan intervensi

2. Pelatihan dan Implementasi Sistem Informasi Aset

BKAD menyelenggarakan pelatihan berbasis sistem informasi setelah menentukan kebutuhan kompetensi, termasuk:

- a. Aplikasi SIMDA BMD;
- b. SIPKD Aset;
- c. SIMBADA, atau sistem informasi lokal yang digunakan oleh daerah.

Pelatihan mengambil bentuk-bentuk berikut:

- a. pelatihan di kelas;
- b. lokakarya tentang penggunaan aplikasi; dan
- c. dukungan teknis (pembinaan) ketika karyawan memasukkan data dunia nyata.

Para petugas yang menyelesaikan program ini akan mampu:

- a. Memasukkan, memperbarui, dan menyeimbangkan informasi aset,
- b. Mengawasi basis data aset regional;
- c. Menghasilkan laporan aset yang akurat dan otomatis.

3. Integrasi Sistem Informasi dengan Alur Kerja

Setelah aparatur terlatih, sistem informasi mulai diintegrasikan dalam alur kerja pengelolaan aset daerah. Integrasi dilakukan pada proses:

- a. mendokumentasikan perolehan aset;
- b. melacak produk;
- c. menilai dan mengamankan aset
- d. mengelola dan melaporkan aset regional. Pada tahap ini, aparatur mulai mempraktikkan hasil pelatihan secara langsung dalam tugas sehari-hari. Penggunaan sistem informasi terbukti meningkatkan kecepatan pemrosesan data, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memperkuat akuntabilitas.



4. Pengawasan dan Pendampingan Berkesinambungan

Pelatihan hanyalah satu langkah dalam proses pengembangan kapasitas. BKAD menawarkan program supervisi dan pendampingan untuk menjamin bahwa karyawan:

1. Mampu mengatasi hambatan teknologi;
2. Selalu mengikuti perkembangan fitur aplikasi; dan
3. Secara konsisten memahami SOP manajemen aset. Pendampingan juga mendorong terbentuknya budaya kerja berbasis data dan teknologi yang berkesinambungan.

5. Penilaian dan Peningkatan Proses

Evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan:

- a. Audit aset internal;
- b. Memverifikasi kebenaran data dan kualitas input;
- c. Melacak penggunaan aplikasi; dan
- d. Umpan balik pengguna sistem.

Prosedur operasi standar (SOP), modul pelatihan, dan fitur sistem informasi semuanya ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi. Penilaian ini menjamin bahwa peningkatan kapasitas staf bersifat dinamis dan beradaptasi dengan kebutuhan lokal.

6. Pengaruh terhadap Pengelolaan Aset Regional

Bidang-bidang berikut ini mengalami peningkatan signifikan ketika sistem informasi aset digunakan:

- a. manajemen aset yang terorganisir;
- b. data inventaris yang akurat dan berkualitas tinggi;
- c. prosedur pelaporan yang efektif; dan
- d. keterampilan perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Sistem ini meningkatkan daya tanggap, profesionalisme, dan kapasitas untuk menangani aset lokal dengan standar manajemen yang lebih tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparat BKAD untuk pengelolaan aset daerah berbasis sistem informasi terorganisasi, metodis, dan hierarkis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis aparat dalam menggunakan program sistem informasi aset yang digunakan oleh pemerintah daerah serta kompetensi mereka dalam memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Aset Daerah (BMD).

Upaya yang disengaja untuk meningkatkan standar tata kelola Aset Daerah (BMD) adalah kegiatan peningkatan kapasitas aparat BKAD dalam mengelola aset daerah berbasis sistem informasi. Pengelolaan aset daerah tidak dapat lagi dilakukan secara manual karena meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan; sebaliknya, dukungan teknologi informasi diperlukan untuk menjamin keakuratan, kecepatan, dan ketepatan data.

1. Banyak pemerintah kota masih bergumul dengan data aset yang tidak akurat, kesalahan klasifikasi, pembaruan data yang sporadis, dan kompetensi personel yang rendah. Dengan



demikian, tujuan program peningkatan kapasitas ini adalah untuk: meningkatkan pemahaman karyawan tentang kebijakan dan prosedur manajemen aset,

2. Meningkatkan kapasitas teknis peralatan untuk menjalankan sistem informasi aset regional (SIMDA BMD, SIPKD Asset, SIMBADA, atau aplikasi lokal lainnya) memperkuat budaya kerja berbasis teknologi,
3. Pastikan bahwa norma tata kelola dan akuntabilitas yang baik diikuti saat mengelola aset regional.

Tugas ini diorganisasikan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Diharapkan bahwa keseluruhan rangkaian tindakan akan menghasilkan suatu perangkat yang lebih mampu, profesional, dan siap untuk menangani tuntutan pemerintahan berbasis digital.

Tujuan dari fase Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Analysis/TNA) adalah untuk memetakan keterampilan dasar personel BKAD, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, dan memutuskan pelatihan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Wawancara, observasi, kuesioner, dan tinjauan dokumentasi implementasi manajemen aset regional digunakan dalam analisis ini.

Analisis kebutuhan peserta menjadi dasar penyusunan program peningkatan kapasitas peralatan BKAD. Melalui penggunaan sistem informasi aset, program ini berupaya meningkatkan kemahiran teknis dan pemahaman regulasi peralatan dalam pengelolaan Aset Regional (BMD).

Langkah terpenting dalam meningkatkan kemampuan staf BKAD adalah praktik langsung, yang memungkinkan peserta untuk secara langsung melakukan semua operasi manajemen aset menggunakan sistem informasi di samping memahami teori. Hasil praktik menunjukkan beberapa pencapaian penting yang dapat dikarakterisasi.

Pencapaian yang diraih oleh peserta pelatihan melalui penerapan praktis semua materi, proses, dan sistem yang dipelajari selama kegiatan peningkatan kapasitas dikenal sebagai hasil praktik langsung. Keterampilan teknis (pengoperasian aplikasi, input data, rekonsiliasi) dan prosedural (penyusunan KIB, transfer aset, penghapusan piutang, dan pelaporan) peserta tercermin dalam hasil ini.



Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan pendampingan BKAD di kantor gubernur kota Makassar.

KESIMPULAN

Peningkatan kapasitas aparat BKAD melalui pelatihan berbasis sistem informasi aset regional telah berhasil, menurut temuan penelitian dan implementasi kegiatan. Kompetensi regulasi, administrasi teknis, pengoperasian sistem informasi, pemahaman SOP, dan koordinasi antar unit



semuanya perlu ditingkatkan, menurut analisis kebutuhan peserta. Keterampilan peserta dalam memasukkan data aset, membuat Kartu Inventaris, transfer dan penghapusan aset, rekonsiliasi data, dan memperbaiki masalah teknis dalam sistem berhasil ditingkatkan melalui implementasi pelatihan, yang menggabungkan teori, praktik langsung (hands-on), simulasi lapangan, dan diskusi kelompok.

Kompetensi staf meningkat secara signifikan sebagai hasil dari pengalaman praktis, yang terlihat dari peningkatan validitas data aset, pelaporan yang lebih akurat, dan keselarasan praktik manajemen aset dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sebagai hasilnya, pelatihan ini mendukung penerapan sistem informasi aset sebagai instrumen penting untuk tata kelola aset yang efisien, memperkuat profesionalisme staf, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam manajemen aset regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Di Harjo, F. F., & Desfina, D. (2024). Analisis Penerapan Aplikasi SIMDA BMD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Guna Memaksimalkan Pemanfaatan Aset Daerah: Studi Kasus BKAD Kabupaten Bintan. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan*, 2(2), 20–26.
- Fauzi, R. (2020). Efisiensi Pengelolaan Aset Daerah melalui SIMDA BMD. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(3), 45–56.
- Fransiska, W., Pratama, M. N. R. F., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Strategi Pengelolaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 198–207.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Muhibuddin, A., & Juharni, J. (2024). Strategi Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar. *Paradigma Journal of Administration*, 2(2), 54–62.
- Nursafitri, R. E., & Andayani, S. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengamanan aset tetap daerah. *Jurnal Maneksi*, 10(2), 177–185
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.